BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Tingkat kebersihan suatu perkotaan merupakan indikator penting yang mencerminkan perkembangan wilayah tersebut dibandingkan dengan daerah yang kurang bersih. Kebersihan kota bukan sekadar masalah penampilan, tetapi juga menjadi tolak ukur kesejahteraan penduduk, kualitas kehidupan, dan efisiensi pemerintahan setempat (Jamaludin, 2017). Jika suatu kota bersih dari sampah itu tandanya kota tersebut sudah lebih maju dibandingkan kota-kota lainnya dari segi kebersihan.

Ada tiga aspek yang menjadikan isu persampahan ini sangat dominan, yang pertama yaitu aspek keindahan dan kebersihan daerah. Yang kedua yaitu aspek lingkungan, timbulan sampah yang tinggi juga merupakan polusi pencemaran lingkungan, semakin tercemarnya lingkungan akibat sampah, semakin tinggi juga potensi banjir meningkat. Yang ketiga yaitu sampah Berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, (Puteri Mahyudin et al., 2023).

Dari ketiga aspek tersebut dapat dapat ditinjau bahwa urgensi sampah ini bersifat kompleks menyangkut banyak hal. Banyak aspek yang terdampak oleh permasalahan sampah ini, salah satunya aspek perkembangan perkotaan, karena timbulan sampah yang muncul menjadi salah satu penghambat pertumbuhan suatu perkotaan (Ridho, 2022). Pencemaran lingkungan akibat sampah sangatlah signifikan, mulai dari tanah, tumpukan sampah yang tidak terkelola dengan baik akan menyebabkan pembusukan di area tersebut, terutama sampah

yang berjenis plastik, yang mana sampah jenis ini sangat sulit terurai di tanah.(M Kamali Zaman, 2016).

Berbagai kota maupun daerah yang ada di Indonesia saat ini sedang menghadapi masalah yang sama pada kasus persampahan Keterlibatan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bahkan stakeholder terkait masih sangat dibutuhkan dalam proses pembentukan kebijakan dalam upaya penanggulangan permasalahan yang dihadapi sekarang ini ((Fatriani,Riri et.al, 2024)(Arrozaaq, 2016)). Permasalahan sampah ini sangatlah krusial di setiap kota-kota yang ada di Indonesia. Salah satunya yang menjadi lokasi pada penelitian ini adalah kota Jambi.

Timbulan sampah di Kota Jambi setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan, yang mana hal ini disebabkan berbagai faktor mulai dari perilaku konsumtif masyarakat, sampai dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Jambi dalam menindak lanjut permasalahan sampah ini. Berikut peneliti menyajikan data timbulan sampah Kota Jambi selama tiga tahun terakhir mulai dari 2021 sampai 2023.

Tabel 1. 1 Data Timbulan Sampah Kota Jambi

Tahun	**Timbulan Sampah Harian (ton)**	**Timbulan Sampah Tahunan (ton)**
2021	447,99	163.516,42
2022	443,56	161.897,58
2023	437,50	159.688,01
Total	**1.314.23**	**479.692,57**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Jambi

Data yang disajikan di atas merupakan data timbulan sampah yang dihasilkan oleh Kota Jambi dari tahun 2021sampai tahun 2023. Dapat dilihat

bahwa rata-rata kota Jambi menghasilkan 438,1 timbulan sampah perhari dan 156.897,52 ton per tahun. Dari data tersebut menunjukkan angka yang terbilang tidak sedikit, yang mana setiap tahunnya jumlah timbulan sampah di Kota Jambi terus bertambah secara signifikan terutama pada tahun 2022 sampai 2023 yang mengalami kenaikan sebanyak 7 ton dari tahun sebelumnya. Tren kenaikan timbulan sampah ini jika tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan masalah pada penumpukan sampah itu sendiri, menyebabkan polusi, hingga penurunan kualitas lingkungan (Danna, 2021). Selain itu dengan naiknya volume timbulan sampah ini dapat menimbulkan resiko kapasitas fasilitas pengelolaan sampah menjadi tidak memadai, yang dapat menyebabkan kesulitan dalam proses pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah.

Jika pengelolaan sampah tidak efisien, timbulan sampah yang berlebihan dapat menyebabkan masalah kesehatan masyarakat seperti penyakit yang ditularkan melalui sampah, kualitas udara yang buruk, dan gangguan pada lingkungan tempat tinggal terutama pada masyarakat di Kota Jambi itu sendiri. Ketidakmampuan untuk mengelola sampah secara efektif juga dapat berdampak pada sektor ekonomi, seperti para pelaku usaha yang terganggu oleh munculnya biaya tambahan untuk pengelolaan sampah, serta dampak negatif pada nilai properti (Hikmah Perkasa et al., 2022).

Agar permasalahan sampah ini dapat ditekan turun maka diperlukan upaya oleh pemerintah kota jambi supaya permasalahan sampah di Kota Jambi dapat ditekan turun. Melalui Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus diusung dengan manajemen persampahan yang baik dan berkelanjutan yang

harus didasarkan pada prinsip fundamental agar proses tata kelola persampahan berjalan dengan baik.

Persampahan di kota Jambi ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah. Pada peraturan ini lah pengelolaan sampah sebagaimana diatur mulai dari tanggung jawab, tujuan, strategi dan kewenangan oleh pihak terkait dengan memuat poin-poin penting diantaranya sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pengelolaan sampah.
2. Pengurangan timbulan sampah
3. Penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.

Salah satu yang menjadi permaslaahan pada penelitian ini adalah didalam peraturan tersebut, masih adanya pelanggaran dalam implementasi kebijakan tersebut karena masyarakat masih belum mentaati poin-poin penting yang disebutkan seperti bahwa dalam kurun waktu tertentu ada target penurunan timbulan sampah secara berkala, faktanya dari data yang penulis sajikan sebelumnya, timbulan sampah setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan, hal tersebut berbanding terbalik antara ekspektasi dengan realita yang ada. Masalah lainnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada waktu yang telah ditentukan yakni setelah pukul 18.00 WIB mengakibatkan permasalahan berkelanjutan. Meskipun sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) secara rutin diangkut, namun karena masyarakat tidak mematuhi jadwal dan aturan yang berlaku, selalu muncul sampah baru yang membuat lingkungan kota terlihat kotor dan tidak terawat.

Seperti yang dikutip oleh penulis dari laman berita MC JAMBI berikut: “Masih banyak sampah yang berserakan di sekitar tempat pembuangan sampah , yang mana seharusnya sampah tersebut dibuang dan dimasukkan kedalam kotak sampah yang disediakan oleh pihak dinas lingkungan hidup kota Jambi” (JAMBI, 2024). Tetapi, jika dilihat dari sudut pandang lain, masalah ini tidak boleh sepenuhnya menyalahkan masyarakat, karena tidak semua dari masyarakat mengetahui akan peraturan yang peneliti paparkan sehingga mengakibatkan masyarakat melanggar aturan tersebut.

Dari berbagai hal yang sudah dipaparkan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa permasalahan sampah ini masih butuh pengelolaan yang baik, salah satunya yang akan diteliti oleh penulis yaitu mengenai kebijakan tata kelola sampah yang ada di Jambi. Sejak Perda nomor 5 tahun 2020 diterbitkan, permasalahan ini masih juga belum efektif teratasi, terbukti dari data- data yang sudah peneliti paparkan sebelumnya. Untuk itu peran pemerintah dan juga masyarakat sangat dibutuhkan agar tata kelola persampahan yang ada di kota Jambi dapat terlaksana dengan baik. Dengan demikian berbagai macam dampak negatif yang ditimbulkan dapat ditekan serta diminimalisirkan.

Untuk memberikan perspektif baru yang belum terlihat oleh peneliti sebelumnya, penulis menggunakan 20 penelitian jurnal yang relevan dengan topic penelitian yang akan penulis teliti. terdapat 5 penelitian jurnal yang berfokus pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Penelitian oleh Aminullah et al., (2022) dengan temuan bahwa Keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan limbah didorong oleh sumber daya manusia yang

kompeten. Integrasi sistem komunikasi antara pemerintah daerah dan pusat untuk pengelolaan limbah. Tantangan dalam pengelolaan limbah termasuk kesadaran publik, kendala anggaran, dan modernisasi. Penelitian oleh Muhammad et al., (2022), dengan temuan Implementasi peraturan pengelolaan sampah di kota Mojokerto berhasil melalui Pembentukan bank sampah dengan sistem 3R di 154 lokasi. Serta Pelaksanaan pengelolaan sampah melalui bank sampah berbasis masyarakat di Mojokerto. Penelitian oleh Febryanti, Aldri Alfrinardi (2024), bahwa pengelolaan sampah memiliki peran krusial dalam pembangunan berkelanjutan, yang membawa dampak positif terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan bersama. Good Environmental Governance (GEG) menjadi landasan penting untuk pengelolaan sampah yang efektif, dengan prinsip-prinsipnya mencakup transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, keadilan, dan keberlanjutan. Pentingnya pengelolaan sampah dalam konteks pembangunan berkelanjutan mencakup aspek lingkungan, kesehatan, partisipasi masyarakat, efisiensi sumber daya, dan tanggung jawab moral terhadap generasi mendatang. Penelitian oleh Muhammad Ibrahim Sahupala, (2020), dengan temuan yakni Tantangan pelaksanaan kebijakan pengelolaan limbah karena keterbatasan anggaran. Kurangnya kesadaran publik mempengaruhi efektivitas kebijakan pengelolaan limbah. Masalah implementasi karena komunikasi yang buruk dan pengawasan yang tidak memadai. Penelitian oleh Puspita et al., (2022), dengan temuan yaitu Tantangan dalam pengelolaan limbah karena pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam

pengelolaan limbah untuk kesehatan lingkungan. Implementasi konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) untuk pengelolaan limbah. Masalah pengelolaan limbah Indonesia dan perlunya penanganan limbah yang tepat.

4 penelitian yang berfokus pada collaborative governance pada pengelolaan sampah. Penelitian oleh Puspita & Wahyudi, (2023), dengan temuan Tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan sampah di Jombang efektif. Pemangku kepentingan berpartisipasi dalam semua tahapan proses kolaboratif. Kepercayaan, komitmen, dan akuntabilitas adalah indikator utama keberhasilan. Penelitian oleh Eka et al., (2023), dengan temuan Proses kolaborasi di TPST My Responsibility di Lamongan sudah optimal. Kolaborasi yang efektif mengarah pada stabilitas dan peningkatan motivasi di antara para pemangku kepentingan. Tantangan termasuk konflik sosial, kurangnya sumber daya, dan kesadaran masyarakat. Pengelolaan limbah melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan kolaborasi masyarakat. Penelitian oleh Suryani, (2022), dengan temuan Pengelolaan sampah di Pekanbaru bersifat konvensional, kurang kolaborasi, dan kesadaran masyarakat. Kolaborasi pemangku kepentingan dalam pengelolaan limbah terhambat oleh berbagai faktor. Hanya pemerintah dan sektor swasta yang memiliki kolaborasi efektif dalam pengelolaan limbah. Penelitian oleh Hamdan et al., (2018), dengan temuan yakni berupa Merekomendasikan peningkatan sumber daya pengelolaan limbah dan sosialisasi yang efektif untuk kesadaran masyarakat. Menekankan pengelolaan limbah bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk kebersihan perkotaan.

4 penelitian yang berfokus pada sarana dan prasarana OPD pengelolaan sampah. Penelitian yang dilakukan oleh Paramita et al., (2018), dengan temuan Unit Pengolahan Sampah Organik memiliki kapasitas rendah untuk mengurangi limbah organik. TPA Cipayung menimbulkan bahaya sedang berdasarkan Pendekatan Berbasis Risiko Terpadu. Kota Depok membutuhkan lebih banyak infrastruktur limbah untuk mengurangi pembuangan TPA. Penelitian oleh Wahdatunnisa, (2019), dengan temuan Pengelolaan limbah di Pangandaran kurang optimal, kurang eksekusi yang tepat. Tantangan termasuk kendala anggaran dan fasilitas pengelolaan limbah yang tidak memadai. Limbah berbahaya dikubur dengan tanah untuk memastikan keamanan. Penelitian Oleh Budijaya, (2023), dengan temuan Kebijakan publik perlu mempertimbangkan aspek-aspek seperti infrastruktur, teknologi, dan pemberdayaan masyarakat untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan sampah. Penelitian oleh Saharuddin et al., (2024), dengan temuan DLHK telah melakukan beberapa upaya pengelolaan sampah, yaitu melalui pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengelolaan sampah terdiri dari:(a)Faktor pendukung: sosialisasi pengelolaan sampah dan penyediaan tempat penampungan sampah. (b)Faktor penghambat: dana/anggaran yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, serta kurangnya kesadaran masyarakat.

5 Penelitian yang berfokus pada strategi pengelolaan sampah. Penelitian oleh Jayantri & Ridlo, (2022), dengan temuan Enam studi kasus tentang strategi pengelolaan limbah pesisir di Indonesia. Menekankan pentingnya pengelolaan

limbah yang tepat di daerah pesisir. Jenis limbah termasuk limbah organik dan anorganik, dikelola melalui daur ulang. Penelitian oleh Rahim, (2020), dengan temuan Strategi pengelolaan limbah yang sukses di negara maju untuk praktik berkelanjutan. Program Waste to Energy berkembang di Uni Eropa, berlaku di Indonesia. Negara-negara teratas yang unggul dalam daur ulang limbah dan pengelolaan limbah berkelanjutan. Penelitian oleh Hikmah Perkasa et al., (2022), dengan temuan Mengatasi tantangan ekonomi dan masalah lingkungan melalui inisiatif pengelolaan limbah. Berfokus pada menciptakan lingkungan yang bersih dan mempromosikan kesadaran pengelolaan limbah. Memberikan keterampilan kewirausahaan dan pengetahuan pemasaran untuk pengembangan bisnis mikro. Penelitian oleh Sitorus et al., (2023), dengan temuan berupa strategi pengelolaan sampah melalui pengomposan agar limbah dapat berkurnag hingga 80% di malalayang dengan target sampai dengan tahun 2036. Penelitian oleh Anggraini & Susanto, (2019), dengan temuan strategi pengelolaan limbah yang efektif untuk kebersihan dan kesehatan lingkungan. Tantangan dalam metode pembuangan limbah dan dampak lingkungannya. Pentingnya undang-undang dalam pengelolaan limbah untuk kejelasan dan tanggung jawab hukum.

2 penelitian yang berfokus pada pengelolaan sampah berbasis pelayanan. Penelitian oleh , dengan temuan bahwa pengelolaan sampah memiliki peran krusial dalam pembangunan berkelanjutan, yang membawa dampak positif terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan bersama. Good Environmental Governance (GEG) menjadi landasan penting untuk

pengelolaan sampah yang efektif, dengan prinsip-prinsipnya mencakup transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, keadilan, dan keberlanjutan. Pentingnya pengelolaan sampah dalam konteks pembangunan berkelanjutan mencakup aspek lingkungan, kesehatan, partisipasi masyarakat, efisiensi sumber daya, dan tanggung jawab moral terhadap generasi mendatang. Penelitian oleh Danna, (2021), dengan temuan bahwa Kualitas layanan pengelolaan limbah di Kabupaten Batang perlu ditingkatkan. Dimensi jaminan dan empati dianggap cukup baik dalam penelitian ini. Dimensi nyata, keandalan, dan daya tanggap membutuhkan perhatian dan peningkatan.

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

No.	Kategori Pengelompokkan	Hasil/Temuan
1.	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah	Dari lima penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah bergantung pada kompetensi sumber daya manusia, integrasi komunikasi antar pemerintah, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi. Tantangan utama meliputi keterbatasan anggaran, partisipasi publik yang rendah, dan lemahnya pengawasan. Implementasi yang efektif memerlukan sinergi lintas lembaga dan peran aktif masyarakat

		untuk mengatasi dampak urbanisasi dan pertumbuhan populasi.
2.	Collaborative pada pengelolaan sampah	Empat penelitian menunjukkan bahwa efektivitas collaborative governance dalam pengelolaan sampah sangat bergantung pada partisipasi aktif, kepercayaan, dan akuntabilitas pemangku kepentingan. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, seperti di Lamongan, telah meningkatkan stabilitas meski ada tantangan sumber daya dan konflik sosial. Namun, minimnya kolaborasi di Pekanbaru menghambat efektivitas. Secara keseluruhan, diperlukan peningkatan sumber daya dan sosialisasi untuk memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya kerja sama dalam menjaga kebersihan lingkungan.
3.	Sarana dan prasarana OPD pengelolaan sampah	Empat penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur dan dana menjadi kendala utama dalam

		pengelolaan sampah yang efektif. Di Depok dan Pangandaran, kapasitas fasilitas yang rendah dan anggaran terbatas menghambat proses pengolahan. Studi-studi ini juga menekankan pentingnya kebijakan yang mendukung infrastruktur, teknologi, dan pemberdayaan masyarakat untuk keberlanjutan pengelolaan sampah, namun terbatasnya anggaran dan rendahnya kesadaran publik tetap menjadi tantangan.
4.	Strategi Pengelolaan Sampah	Lima penelitian menunjukkan bahwa strategi pengelolaan sampah yang efektif memerlukan pendekatan kombinasi daur ulang, waste-to-energy, pengomposan, dan dukungan kebijakan hukum. Pendekatan ini mendukung keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, terutama di wilayah pesisir dan perkotaan, dengan keterlibatan aktif

		pemerintah dan masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan.
5.	Pengelolaan Sampah Berbasis Pelayanan	Hasil dari dua penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah berbasis pelayanan masih menghadapi tantangan, terutama terkait kurangnya fasilitas pembuangan yang memadai dan partisipasi masyarakat. Meskipun ada inisiatif masyarakat untuk mengelola limbah secara mandiri, kualitas layanan di Kabupaten Batang perlu ditingkatkan, khususnya pada dimensi keandalan dan daya tanggap, agar kepuasan masyarakat terhadap layanan pengelolaan limbah dapat meningkat.

Sumber: Dikelola oleh Peneliti

Dari penelitian terdahulu yang telah penulis paparkan dan juga penulis kelompokkan menjadi 5 kategori mulai dari implementasi kebijakan tentang pengelolaan sampah, collaborative governance pada pengelolaan sampah, sarana dan prasarana OPD pengelolaan sampah, strategi pengelolaan sampah, dan diatas maka penulis memposisikan penelitan ini untuk mengevalusi sudah sejauh mana kebijakan ini sudah menyelesaikan persoalan sampah di Kota

Jambi. Maka penulis merumuskan judul penelitian ini dengan judul " **Evaluasi Kebijakan Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Jambi ".**

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai pemaparan latar belakang masalah yang penulis paparkan bahwa penuntasan permasalahan pengelolaan sampah di kota Jambi yang di atur dalam Peraturan daerah yang dikeluarkan masih belum dapat terealisasi dengan baik terhadap masalah sampah yang ada di kota Jambi. Maka dari itu penulis merumuskan masalah yaitu : "Bagaimana evaluasi dari kebijakan tentang pengelolaan sampah dalam menyelesaikan permasalahan sampah di Kota Jambi?"

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun sebagaimana penelitian ini dilakukan yakni untuk mencapai tujuan agar penulis dapat membuahkan manfaat yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: "Untuk Mengevaluasi sudah sejauh mana Kebijakan Tentang Pengelolaan Sampah mengatasi permasalahan sampah di Kota Jambi".

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman penulis mengenai tingkat penerapan kebijakan pengelolaan sampah saat ini untuk mengoptimalkan hasil implementasi yang telah dilakukan serta dapat melengkapi dan mengoptimalkan temuan dari penelitian-penelitian terdahulu.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan saran kepada pemerintah mengenai penerapan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Jambi sesuai dengan peraturan yang dicetuskan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peraturan yang berlaku sehingga pengelolaan sampah di Kota Jambi dapat dilakukan dengan baik oleh semua pihak.

1.5 Landasan Teori

Teori merupakan acuan yang akan digunakan oleh penulis dalam menganalisis masalah yang ditemukan di lapangan. Teori akan digunakan untuk menjelaskan indikator, mengidentifikasi masalah, dan memberi peneliti alat untuk memecahkan masalah di lapangan sesuai dengan variabel dan topik penelitian. Maka teori yang digunakan oleh penulis adalah teori "Evaluasi Kebijakan".

1.5.1 Evaluasi Kebijakan

Sebagian besar ahli kebijakan publik berpendapat bahwa tahap akhir dari proses kebijakan adalah evaluasi. Hasil dari evaluasi ini kemudian digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai objek yang telah dievaluasi (Kusamanegara.solahuddin, 2010).

Anderson berpendapat evaluasi kebijakan berfokus pada pengukuran, penilaian, dan perkiraan terhadap pelaksanaan dan dampak suatu kebijakan. Meskipun sering dianggap sebagai tahap akhir, evaluasi sebenarnya dapat diterapkan di seluruh proses kebijakan. Contohnya, dalam memilih alternatif

kebijakan terbaik, dilakukan estimasi konsekuensi dari berbagai pilihan yang ada (Kusamanegara.solahuddin, 2010).

Proses ini mencakup pengukuran dan penilaian objektif terhadap implementasi serta hasil kebijakan atau program. Tujuannya adalah merumuskan strategi yang tepat untuk masa depan berdasarkan hasil evaluasi (Mamahit et al., 2021).

Sedangkan menurut M.Ramesh et al., (2018) mengajukan pendekatan "*policy capacity*" dalam evaluasi kebijakan. Pendekatan ini menilai kapasitas kebijakan berdasarkan keterampilan dan kompetensi lembaga pembuat kebijakan, meliputi kemampuan analitis, operasional, dan dukungan politik..

Sementara itu William N. Dunn, (2006) memaknai evaluasi kebijakan sebagai proses menghasilkan informasi mengenai nilai dan kegunaan dari hasil kebijakan. Terdapat beberapa indikator/kriteria untuk mengevaluasi suatu kebijakan, diantaranya yaitu:

A. Efektivitas

Tingkat keberhasilan sebuah kebijakan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dapat diukur melalui dimensi efektivitas. Dimensi ini menggunakan dua indikator utama: harapan dan realisasi. Harapan merupakan keyakinan dasar bahwa target yang diinginkan dapat dicapai atau suatu kejadian akan berlangsung sesuai rencana. Sementara realisasi menunjukkan implementasi aktual yang menghasilkan output selaras dengan ekspektasi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

B. Efisiensi

Dimensi efisiensi mengevaluasi besaran usaha yang dibutuhkan untuk meraih level efektivitas tertentu. Dimensi ini menganalisis relasi antara masukan (input) dan keluaran (output) dalam implementasi suatu kebijakan atau program. Dalam pengukurannya, efisiensi menggunakan dua indikator kunci: sumber daya dan optimalisasi. Sumber daya merujuk pada kapasitas yang tersedia, baik dalam bentuk sumber daya manusia maupun infrastruktur pendukung kebijakan seperti biaya yang digunakan dalam menjalankan kebijakan. Adapun optimalisasi adalah upaya untuk memaksimalkan hasil, baik melalui peningkatan efektivitas sistem yang ada maupun perancangan sistem baru yang lebih optimal.

C. Kecukupan

Dimensi ini menilai sejauh mana kebijakan memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Kecukupan berkaitan dengan apakah kebijakan tersebut cukup komprehensif untuk menangani masalah yang ada dan memberikan solusi yang memadai bagi masyarakat yang menjadi target.

D. Pemerataan

Pemerataan mengukur sejauh mana manfaat dari kebijakan didistribusikan secara adil di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Kebijakan yang baik harus mampu mengurangi ketimpangan dan memastikan bahwa semua kelompok, terutama yang kurang beruntung, mendapatkan manfaat yang setara.

E. Responsivitas

Dimensi ini menilai sejauh mana kebijakan dapat merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas berkaitan dengan kemampuan pembuat kebijakan untuk mendengarkan umpan balik dari masyarakat dan melakukan penyesuaian yang diperlukan agar kebijakan tetap relevan dan efektif.

F. Ketepatan

Ketepatan mengukur sejauh mana kebijakan sesuai dengan konteks dan kondisi yang ada. Ini mencakup analisis tentang apakah kebijakan tersebut dirancang dengan mempertimbangkan faktor-faktor lokal dan spesifik yang mempengaruhi implementasi dan hasilnya.

1.6 Kerangka Berpikir

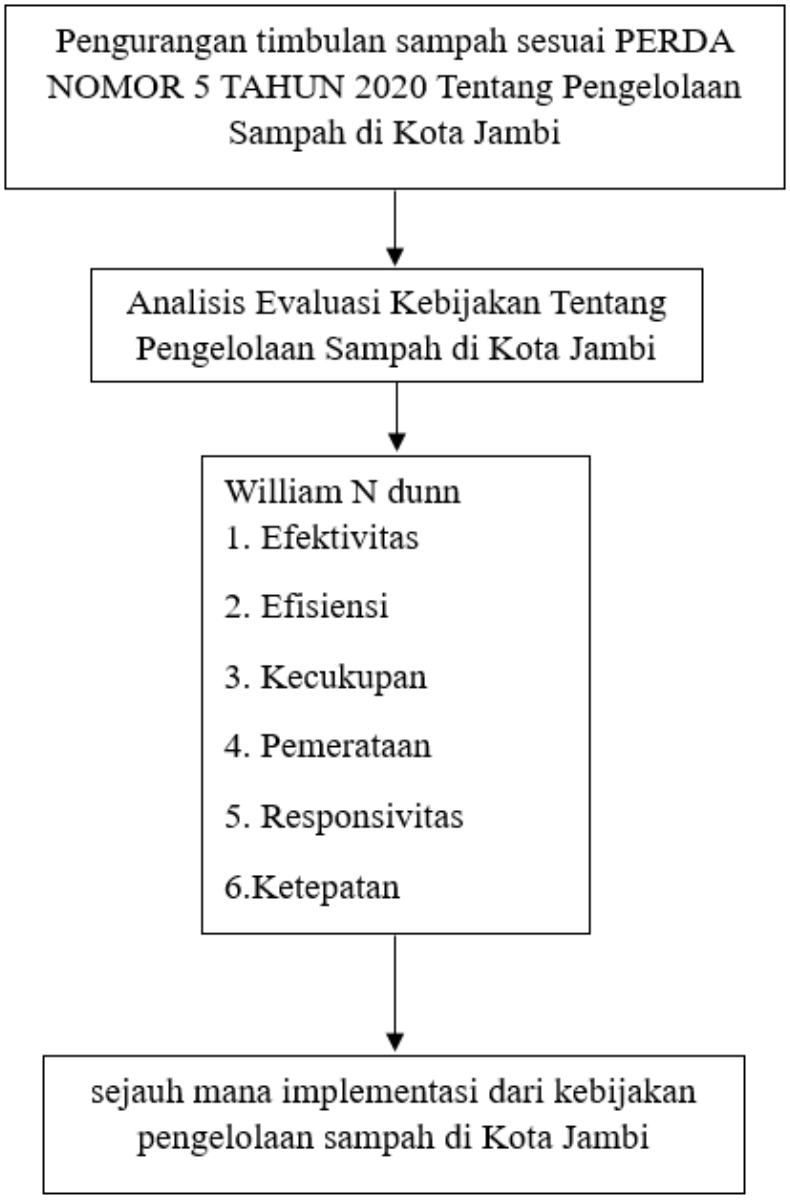

Sumber: Dikelola Oleh Peneliti

Berdasarkan kerangka berpikir yang dibuat oleh penulis di atas, pemerintah Kota Jambi sudah membuat kebijakan tentang pengelolaan sampah yang tercantum dalam perda nomor 5 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah di kota jambi yang mana dari peraturan inilah kebijakan mengenai pengelolaan

sampah di Kota Jambi di tuangkan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori evaluasi kebijakan oleh William N Dunn (2011), dengan 6 indikator. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Jambi sudah berjalan dengan semestinya atau tidak.

1.7 Metode Penelitan

1.7.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada dasarnya metode penelitian merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi suatu permasalahan yang ada dilapangan dengan melalui tahapan pendeskripsian secara detail dan mendalam mengenai situasi dalam suatu konteks yang alami (natural setting), tentang apa yang sebenarnya terjadi berdasarkan apa yang ada dilapangan (Robert Bogdan, Steven J, 1993).

Tahapan yang digunakan peneliti sebagai modal dalam mendapatkan data untuk menggali temuan pada evaluasi kebijakan pengelolaan di kota Jambi yakni menggunakan pendekatan kualitatif karena pada dasarnya harus melakukan survey,observasi dan wawancara langsung kepada objek penelitian dilapangan agar permasalahan dapat dipecahkan hingga mampu dideskripsikan secara menyeluruh (Cresswell, 2012).

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metodologi kualitatif deskriptif, untuk memahami secara mendalam fenomena yang terjadi dalam konteks pengelolaan sampah di Kota Jambi. Pendekatan ini dipilih karena pada pemahaman terhadap proses, persepsi, dan pengalaman berbagai pihak terkait kebijakan pengelolaan sampah, bukan pada pengukuran atau generalisasi

statistik. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk melakukan pengkajian mendalam terkait dinamika lingkungan, konteks, dan kondisi aktual di lapangan dalam unit penelitian yang spesifik. Melalui proses, peneliti berupaya memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di Kota Jambi, termasuk interaksi antar elemen terkait, posisi strategis, serta realitas yang dihadapi di lapangan.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan bagian penting dari proses penelitian itu sendiri, karena proses mendapatkan data dengan kejelasan yang baik diperlukan lokasi yang tepat agar pemeceahan masalah yang diteliti dapat diselesaikan. Maka penelitian ini akan dilaksanakan di dinas lingkungan hidup kota Jambi.

1.7.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis evaluasi sudah sejauh mana implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Jambi, yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2020. Kemudian, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan kebijakan tersebut di lapangan.

1.7.4 Sumber Data

Sumber data merupakan asal muasal peneliti menemukan kebenaran dalam proses penelitian dan semua yang berkaitan dalam proses pengambilan data. Ada berbagai macam sumber data yang dapat dipilih oleh para peneliti, maka peneliti menggunakan data yang bersumber dari:

A. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber asli atau partisipan yang terlibat dalam penelitian (Cresswell, 2012). Dalam penelitian ini data primer dapat diperoleh melalui, wawancara dengan pihak-pihak yang terkait didalam kebijakan pada Perda Nomor 5 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah di Kota Jambi diantaranya Dinas Lingkungan Hidup yaitu kepala bagian pengelolaan sampah, serta kelompok organisasi yang berorientasi terhadap lingkungan seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (disingkat WALHI) Kota Jambi yang dalam hal ini staff kajian dan analisis dan masyarakat Kota Jambi selaku aktor yang terlibat dalam pengelolaan sampah.

B. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data-data yang berasal dari hasil penemuan sebelumnya yang sudah ada, data ini dapat berupa dokumen atau data-data terkait studi literatur yang ada (Cresswell, 2012). Dalam penelitian ini, data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber diantaranya:

1. Dokumen Kebijakan terkait Pengelolaan Sampah dalam hal ini adalah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Jambi .
2. Laporan tahunan Dinas Lingkungan Hidup/Kebersihan terkait pengelolaan sampah, Data statistik jumlah timbulan sampah, tingkat pelayanan, dan sebagainya serta laporan evaluasi atau audit kinerja pengelolaan sampah.
3. Berita,artikel maupun website yang mempublikasikan terkait pengelolaan sampah di Kota Jambi.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Orang yang menjadi sumber data dalam penelitian adalah mereka yang mampu menyampaikan keterangan mengenai keadaan yang diteliti dan disebut sebagai informan. Mereka memiliki pemahaman faktual terkait masalah yang dikaji serta konteks yang berkaitan dengan penelitian tersebut (Cresswell, 2012). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode yang digunakan kualitatif dalam menentukan siapa yang akan menjadi sumber agar data yang dibutuhkan dapat diperoleh melalui informan tersebut. Maka peneliti menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan informan awal pada penelitian ini.

Informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian diberikan oleh informan penelitian. Informan penelitian adalah individu yang benar-benar memahami masalah yang akan diteliti. Untuk ini agar proses pengambilan data berjalan dengan baik, maka peneliti membutuhkan beberapa informan agar objek pada penelitian ini dapat di telusuri.

Tabel 1. 3 Daftar Informan

No.	Informan	Jabatan	Alasan
1.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi	Kepala Seksi Pengelolaan Sampah	Dapat memberikan gambaran lengkap tentang bagaimana pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah karena dia merupakan penanggung jawab utama atas operasional pengelolaan sampah di lapangan.
2.	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Kota Jambi	Staff Kajian dan Analisis Wahana Lingkungan	sebagai lembaga non-pemerintah yang bergerak di bidang lingkungan, yang dapat memberikan sudut pandang yang independen dan kritis

		Hidup Indonesia Kota Jambi	terhadap kebijakan pengelolaan sampah.
3.	Masyarakat kota Jambi	Masyarakat	Partisipasi masyarakat penting untuk menilai sejauh mana kebijakan ini berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Agar data yang diperoleh konkret sebagai acuan dalam menganalisis data, peneliti menggunakan beberapa teknik, diantaranya yaitu wawancara yang terstruktur, wawancara semi-terstruktur, wawancara tidak terstruktur, dan juga studi literatur/kepustakaan/dokumensi. Peneliti menggunakan tiga tahapan tersebut sebagai sebagai proses pendekatan agar data yang dibutuhkan kompleks serta untuk memperoleh informasi yag bersifat ilmiah untuk bukti yang dibutuhkan pada penelitian ini. Selanjutnya peneliti paparkan penjelasan mengenai metode pengumpulan data yang dipilih, antara lain:

a. Wawancara

Suwartono menyatakan bahwa wawancara memiliki peran penting dalam setiap survei penelitian. Tanpa adanya wawancara, peneliti akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan informasi yang hanya bisa diperoleh dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden atau narasumber (Dr. Suwartono, 2014). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan metode wawancara yang dilaksanakan dengan menggunakan panduan wawancara yang sangat ketat dan rigid. Dalam wawancara jenis ini, pewawancara harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan urutan dan redaksi yang

telah ditetapkan dalam panduan tersebut tanpa ada penyimpangan (Cresswell, 2012). Dalam wawancara ini, pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan secara rinci dan mendetail kepada narasumber atau responden. Wawancara jenis ini bersifat kaku dan pertanyaan yang diajukan harus diikuti secara ketat tanpa penyimpangan dari panduan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain, wawancara terstruktur tidak memberikan ruang bagi pewawancara untuk mengembangkan pertanyaan di luar panduan yang sudah ada.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dengan cara menelaah dan mengkaji berbagai dokumen yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dokumen ini dapat berupa berbagai jenis sumber tertulis seperti surat kabar, notulen atau risalah rapat, jurnal pribadi, surat-menyurat, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, dokumen merujuk pada data tekstual yang didapatkan peneliti dari sumber sekunder untuk mendukung dan melengkapi data utama yang diperoleh melalui metode lain seperti wawancara dalam penelitian kualitatif (Cresswell, 2012).

1.7.7 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini ,Penulis akan menggunakan model analisis data secara langsung (lapangan) yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Dalam menganalisis data kualitatif, terdapat tiga tahapan penting yang harus dilalui. Pertama, reduksi data yakni tahapan dalam analisis data kualitatif yang

melibatkan proses seleksi, serta proses transforasi data mentah yang diperoleh dari berbagai sumber. Dalam tahap ini, peneliti memilih dan memfokuskan data yang relevan dan penting sesuai dengan tujuan penelitian yang kemudian di sederhanakan serta di abstraksi menjadi bentuk yang lebih ringkas (Cresswell, 2012). Kedua, penyajian data, pada tahapan iini dilakukan proses mengorganisir serta menyusun data atau informasi yang didapat hingga memungkinkan upaya tahapan selanjutnya yaitu analasis kesimpulan data. Ketiga, analisis dan penarikan kesimpulan data, merupakan upaya atau tahapan terakhir dalam analisis data kualitatif, pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari data yang sudah direduksi dan disajikan sebelumnya (Cresswell, 2012).

1.7.8 Keabsahan Data

Triangulasi adalah suatu pendekatan dalam memperoleh data penelitian dengan mengombinasikan beberapa metode pengumpulan data. Metode ini melibatkan penggunaan lebih dari satu sumber, teknik atau perspektif dalam mengumpulkan dan memvalidasi informasi. Tujuannya adalah untuk melakukan pengecekan silang dan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sudut pandang atau sumber data yang berbeda. Dengan demikian, triangulasi memungkinkan peneliti untuk memeriksa keakuratan dan kredibilitas data dengan membandingkan informasi dari sumber-sumber lain di luar data utama yang dikumpulkan. Hal ini membantu memperkuat validitas temuan penelitian. Triangulasi sumber, triangulasi waktu, triangulasi peneliti, triangulasi metode, dan triangulasi teori adalah berbagai bentuk triangulasi (Cresswell, 2012).

Triangulasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber berguna untuk menguji kebenaran data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data seperti, wawancara, dan arsip atau dokumen pendukung lainnya.